

ABSTRAK

PEMBATASAN MATERI HAK GUGAT ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 16/PDT.G/LH/2023/PN.BKN)

Ekko Harjanto (2310622046), Iwan Erar Joesoef, Irwan Triadi

Penegakan hukum lingkungan hidup memberikan ruang bagi organisasi lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan demi kepentingan pelestarian lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, dalam praktiknya, hak gugat organisasi lingkungan hidup tidak selalu diterima oleh pengadilan, terutama ketika menyangkut kawasan tertentu seperti Hutan Produksi Terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hasil gugatan perbuatan melawan hukum dari organisasi lingkungan hidup atas perkara izin kawasan hutan produksi terbatas dalam Putusan Nomor: 16/PDT.G/LH/2023/PN.BKN dan menganalisis pembatasan materi gugatan organisasi lingkungan hidup berdasarkan Putusan Nomor 16/PDT.G/LH/2023/PN.BKN. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan studi kasus dengan sumber data berupa dokumen putusan pengadilan dan peraturan perundang - undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara tersebut, Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan mengakui peran aktif organisasi lingkungan hidup dalam mengawasi dan menggugat penyalahgunaan izin atas kawasan hutan. Dalam perkara ini, organisasi penggugat mendalilkan bahwa tindakan tergugat yang melakukan kegiatan eksploitasi dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas telah melanggar hukum dan merugikan fungsi ekologis hutan, sehingga memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Temuan ini menghasilkan pemahaman analisis terhadap pembatasan materi hak gugat organisasi lingkungan hidup sebagai instrumen kontrol sosial dan pengawasan terhadap kebijakan pemanfaatan kawasan hutan.

Kata Kunci: Pembatasan Materi, Hak Gugat, Organisasi Lingkungan Hidup, Perbuatan Melawan Hukum, Hutan Produksi Terbatas

ABSTRACT

LIMITATION OF ENVIRONMENTAL ORGANIZATIONS' RIGHT TO SUE AGAINST LIMITED PRODUCTION FOREST AREA (CASE STUDY OF DECISION NUMBER: 16/PDT.G/LH/2023/PN.BKN

Ekko Harjanto (2310622046), Iwan Erar Joesoef, Irwan Triadi

Environmental law enforcement provides space for environmental organizations to file lawsuits in the interests of environmental conservation as regulated in Article 92 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. However, in practice, the right to sue environmental organizations is not always accepted by the courts, especially when it concerns certain areas such as Limited Production Forests. This study aims to analyze the results of the lawsuit for unlawful acts from environmental organizations regarding the case of limited production forest area permits in Decision Number: 16/PDT.G/LH/2023/PN.BKN and the material of environmental organizations' lawsuits restriction based on Decree Number 16/PDT.G/LH/2023/PN.BKN. This study uses a normative juridical method and a case study approach with data sources in the form of court decision documents and related laws and regulations. The results of the study show that in this case, this Decision shows that it recognizes the active role of environmental organizations in supervising and suing permit applications for forest areas. In this case, the plaintiff organization argued that the defendant's actions in carrying out exploitation activities in the Limited Production Forest area had violated the law and harmed the ecological function of the forest, thus fulfilling the elements of an unlawful act as regulated in Article 1365 of the Civil Code. This finding resulted in an understanding of the analysis related to the material of the environmental organization's right to sue as an instrument of social control and supervision of forest area utilization policies.

Keywords: *Limited Material, Right to Sue, Environmental Organization, Unlawful Acts, Limited Production Forest*